

## Kasus Covid-19 di Depok Terus Naik, Pancoran Mas dan Cimanggis Terbanyak

DEPOK (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menyebut kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sedang naik di wilayahnya. Hingga data terakhir pada Kamis (4/5), tercatat ada 664 kasus konfirmasi aktif dengan Kecamatan Pancoran Mas dan Cimanggis menjadi wilayah yang paling banyak terjadi kasus Covid-19.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Depok, Zakiah mengatakan kenaikan kasus Covid-19 disebabkan karena berbagai alasan. Terutama karena turunnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Kenaikan kasus dikarenakan kepatuhan 5M mulai kendur. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas," jelas Zakiah di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (5/5).

Dia menyebut, kenaikan kasus juga karena adanya pasien yang terpapar saat mudik. "Serta arus balik, para pemudik yang sudah kembali ke Depok, mungkin

ada yang terpapar, bergejala dan melakukan pemeriksaan PCR/antigen, sehingga tercatat kasus naik," kata Zakiah.

Data dari Dinkes Kota Depok menyebut, kasus konfirmasi aktif naik sebanyak 65 kasus dalam sehari. Hal itu jika dibandingkan antara data pada Rabu yang mencatat ada 599 kasus konfirmasi aktif dengan data terakhir pada Kamis kemarin.

Tercatat juga, ada 272 kontak erat aktif dan 16 suspek aktif pada Kamis (4/5/2023). Pancoran Mas berada di urutan teratas dalam kasus Covid-19 aktif, yaitu sebanyak 94 kasus. Kemudian diikuti dengan Cimanggis dengan 89 kasus dan Tapos 72 kasus. Sementara kasus Covid-19 terendah berada di Kecamatan Bojongsari dengan 33 kasus, Sawangan dengan 42 kasus dan Limo dengan 48 kasus. Kementerian Kesehatan (Kemkes) meminta agar masyarakat kembali memperketat pemakaian masker mengingat kasus virus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. ● yan

## Pemkot Depok Dinilai Lamban Tangani Masalah Underpass Dewi Sartika

DEPOK (IM) - Aksi vandalisme di Underpass Dewi Sartika, Depok, belum kunjung dibersihkan. Anggota DPRD Depok fraksi PKB, Babai Suhaimi, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lamban menanggapi aksi vandalisme tersebut.

Pantauan di Underpass Dewi Sartika, Jumat (5/5), terlihat coretan itu tak kunjung dibersihkan. Tampak warga sekilas melihat coretan itu sembari berkendara.

"Kalau itu sudah terjadi cukup lama ya sudah sehari-hari sampai sekarang belum ada proses ya. Saya melihat tindakan dan kepekaan pemerintah lambat," kata Babai, Jumat (5/5).

Babai menyebut perlu adanya gerak cepat dari Pemkot untuk menindaklanjuti kasus vandalisme tersebut. Dia menyarankan CCTV segera dipasang di situ.

"Itu kan jawaban klasik jawaban yang tidak pantas dikeluarkan seperti itu. Bodoh sekali kan kalau begitu, kalau cuma sekadar beli CCTV harus misalkan memprogramkan seperti itu," ungkapnya.

Babai menyebut pemasangan CCTV sangat penting dan Pemkot perlu merencanakan hal itu sedari awal untuk menjaga underpass. Menurutnya, jika

coret-coretan itu tak kunjung dibersihkan hal itu merupakan keterlambatan Pemkot dalam bertindak.

"Banyak memang bukan hanya di underpass ada di titik-titik tertentu vandalisme ini terjadi, CCTV itu penting. Sering kali kasus seperti ini dianggap ringan, dianggap sepele, tidak berarti padahal ini sangat merusak keindahan kota, estetika dan kerapihan kota," jelasnya.

Babai menyampaikan saat CCTV sudah dipasang, pelaku harus ditindak secara tegas sesuai prosedur hukum. Sebab, tindakan vandalisme menurutnya dilakukan oleh kalangan anak muda yang perlu adanya arahan dan binaan.

"Jangan hanya sebatas diketahui dan harus disampaikan dan diumumkan. Jadi ketika ada CCTV kemudian diketahui pelakunya anak-anaknya perlu diberi tindakan punishment nya harus berjalan. Sehingga ada efek jera dan juga menjadi catatan atau pegangan dari yang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama jangan dianggap enteng," jelasnya.

Sebelumnya, Aksi vandalisme terjadi di Underpass Dewi Sartika, Depok. Warga mengaku kesal dan berharap pelaku segera ditangkap. ● yan

# 4 Metropolis

FOTO/ANT



## INDONESIA MENJADI TUAN RUMAH PIALA DUNIA PANJAT TEBING 2023

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid (tengah) bersama Event Officer International Federation of Sport Climbing (IFSC) Alessandro Di Cato (kiri) dan Event Delegate IFSC Stanley Yeo (kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (5/5). Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Panjat Tebing 2023 dengan nomor Speed yang akan diikuti oleh 120 pemanjat tebing elit dunia dari 24 negara yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2023 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

# Heru Budi Ancam KJP Siswa Dicabut Jika Kedapatan Merokok

Heru menginstruksikan agar Dinas Pendidikan memastikan betul penerima KJP tepat sasaran. "Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan pemda kan terbatas," tegasnya.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Kepala Dinas Pendidikan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang diketahui merokok. Heru Budi

mengatakan, dengan begitu, KJP tersebut bisa dialihkan ke siswa lain.

Hal itu disampaikan Heru saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Konferensi Kerja Provinsi

(Konkerprov) III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (5/5). Heru awalnya menceritakan pengalamannya meninjau sekolah-sekolah saat bertugas sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

"Waktu Wali Kota di Jakarta Utara tahun 2014, karena saya ajak bicara anak itu bicara di depan dan dia bilang mendapatkan kekerasan. Tugas guru di DKI, minimal mendengarkan cerita anak sambil melihat kondisi anak ini. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok, bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai nggak? Jangan-jangan dibelikan rokok," kata Heru Budi, Jumat (5/5). Heru lantas menginstruk-

sikan agar Dinas Pendidikan memastikan betul penerima KJP tepat sasaran.

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan pemda kan terbatas," tegasnya.

Heru memandang para guru menghadapi berbagai tantangan dalam mencerdaskan peserta didik. Untuk bisa menyesuaikan diri, Heru meminta agar para guru senantiasa berupaya meningkatkan kemampuannya. Selain itu, Heru juga berencana akan kembali gencar berkeliling ke sekolah-sekolah di Jakarta. "Tantangan guru terma-

nya tantangan kita adalah adanya diskusi diam-diam. Saya akan keliling sekolah-sekolah mulai Senin. Anak sekolah bawa HP pas di sekolah, nah itu diwaspadai. Jangan-jangan dia melihat hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran itu," tegasnya.

"Guru kapasitasnya harus ditingkatkan. Misal Guru belum menyiapkan sesuatu ngambil bahan dari YouTube, muridnya bertanya, pertanyaan tentang materi itu, guru nggak bisa jawab, akhirnya mengambil dari YouTube lain untuk menjawab ini. Khusus di DKI, guru sudah cukup tukinnya, sudah cukup baik. Maka dari itu, kemampuannya harus terus ditambahkan," imbuhnya. ● yan

## Pj Gubernur Heru Minta ASN DKI Tidak Pamer Harta

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) Jakarta beserta seluruh keluarganya agar menerapkan pola hidup sederhana atau tidak pamer harta (flexing).

"Iya, semuanya, ASN, keluarganya, diharapkan (tidak pamer harta atau flexing),"

kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kemarin.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/SE/2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta.

Dalam edaran tersebut bahwa SE 14/2023 diterbitkan untuk menindaklanjuti SE Kemendagri Nomor 800/1915/SJ tanggal 31 Maret 2023, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemprov DKI.

"Itu kan turunan dari imbauan Kementerian Dalam

Negeri," ujar Heru.

Edaran itu diterbitkan pada 12 April 2023 dengan mencantumkan lima poin.

Adapun lima poin edaran untuk ASN DKI antara lain, pertama, Kepala Perangkat Daerah mengimbau, mendorong, menegakkan disiplin dan memberikan contoh baik atas pola hidup sederhana kepada jajarannya, serta tidak ragu untuk mendis-

iplinkan, membina, mengurusi dan memberikan sanksi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya yang masih menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ASN.

Kedua, pegawai ASN agar berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dengan member contoh perilaku yang baik dan menjaga integritas serta nama baik instansi. Ketiga, pegawai ASN dan keluarga diharapkan untuk menerapkan budaya hidup sederhana dengan tidak bergaya mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatuhan dan kedisiplinan.

Kemempat, pegawai ASN diminta lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial dengan tidak mengunggah hal-hal yang menunjukkan pola hidup mewah. Terakhir, pegawai ASN agar memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi dan masyarakat dengan konsisten dalam penekanan aturan disiplin dan kode etik pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat edaran tersebut ditembuskan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, dan para Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

"Ini yang paling penting barangkali pesannya kepada kita semua, jaga keluarga masing-masing untuk menerapan pola hidup sederhana," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. ● yan



## LAPORAN KEUANGAN PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		31 DESEMBER 2022 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2021		(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	2022	2021		2022	2021
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>ASET LANCAR</b>			<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Kas dan setara kas	161.592.621	279.754.321	Utang bank - pihak ketiga	4.999.956.905	3.502.125.093
Piutang usaha	72.571.658.561	70.113.597.552	Utang pajak	4.241.769.326	2.528.027.566
Piutang lain-lain			Biaya yang masih harus dibayar	1.796.767.714	778.599.744
Pihak beresasi	27.379.504.894	129.218.963.466	Utang lain-lain pihak ketiga	1.906.981.499	1.917.889.166
Pihak ketiga	15.388.403.894	44.773.150	Pendapatan diterima dimuka	2.078.945.111	1.581.191.338
Persediaan	170.801.474.797	188.152.820.117		15.024.420.556	10.707.832.905
Biaya dibayar dimuka	7.500.000	7.500.000			
	286.310.134.767	387.817.408.606	<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
<b>Aset Tidak Lancar</b>			Liabilitas sewa	59.300.947	59.300.947
Utang muka proyek	18.027.656	12.246.022.656	Utang non-usaha pihak beresasi	7.340.178.996	99.124.209.098
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.751.186.222 dan Rp2.823.092.112	1.132.947.480	2.067.043.590	Liabilitas jangka panjang lainnya	747.586.255	747.586.255
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp146.725.509.345 dan Rp11.227.946.592	66.838.732.223	62.116.294.578	Liabilitas imbalan pesaca kerja	697.227.213	325.011.196
Aset pajak tangguhan	217.564.191	71.506.863		8.784.992.464	100.256.127.495
Investasi pada entitas anak	68.207.271.550	76.800.868.087			
	354.517.406.317	464.618.276.693	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>23.869.413.019</b>	<b>110.963.768.400</b>
			<b>EKUITAS</b>		
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
			Modal saham - 4.000.000.000, lembar saham nilai nominal Rp100 per saham, ditempatkan dan disetor penuh 1.534.680.000	152.468.000.000	152.468.000.000
			Saldo laba	153.513.316.842	153.513.316.842
			Saldo laba (25.890.236)	20.131.193.958	42.995.283.595
			Komponen ekuitas lainnya	328.086.620.564	349.020.016.260
			Kepentingan non-pengendali	4.621.372.734	4.626.968.033
				330.707.993.298	353.647.016.293
			<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>330.707.993.298</b>	<b>353.647.016.293</b>
			<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>354.517.406.317</b>	<b>464.618.276.693</b>

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022		DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021		(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	2022	2021		2022	2021		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	4.114.701.005.741	3.498.458.781.127	Pembelian aset tetap	-	(1.026.533.000)		
Pembayaran kas kepada pemasok	(4.123.542.984.908)	(3.469.549.607.906)	Utang muka proyek	-	(1.020.000.000)		
Pembayaran kepada karyawan	(2.553.438.232)	(2.827.170.620)	Pencairan deposito berjangka	-	38.800.000.000		
Penerimaan bunga	1.230.650	23.947.317	<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>(26.533.696.635)</b>	<b>22.547.798.187</b>		
Pembayaran pajak	(7.585.053.018)	(229.691.845)	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Pembayaran bunga	(376.503.708)	(243.415.272)	Penerimaan (pembayaran) pinjaman	1.497.831.812	(39.246.543.373)		
Pembayaran lainnya - bersih	(7.197.913.260)	(3.085.044.716)	Penerimaan pinjaman dari pihak beresasi	78.546.232.312	212.270.823.352		
			Pembayaran utang kepada pihak beresasi	(53.628.569.189)	(232.223.314.491)		
			<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>26.415.494.935</b>	<b>(99.199.034.512)</b>		
			<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(118.161.706)</b>	<b>102.230.675</b>		
			<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>279.754.321</b>	<b>177.523.646</b>		
			<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>161.592.621</b>	<b>279.754.321</b>		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022		DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021		(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	2022	2021		2022	2021		
<b>PENDAPATAN</b>			<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>				
	4.116.137.837.804	3.489.267.765.180		4.104.722.081.920	3.473.699.086.397		
<b>LABA BRUTO</b>	<b>11.415.755.884</b>	<b>15.568.678.783</b>	<b>LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(22.996.514.817)</b>	<b>(6.443.385.381)</b>		
Pendapatan bunga	1.348.956	23.947.852	<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>129.799.891</b>	<b>(788.620.952)</b>		
Beban penjualan	(11.108.714.542)	(2.807.132.347)	<b>RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(22.866.714.926)</b>	<b>(7.224.006.233)</b>		
Beban umum dan administrasi	(23.212.431.575)	(19.015.006.942)	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>				
Beban bunga dan keuangan lainnya	(355.463.469)	(215.175.963)	Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi	(85.565.505)	50.263.271		
Beban lain-lain	259.989.919	1.303.316	Keuntungan (kerugian) aktual	16.257.446	(11.057.520)		
	(34.415.270.701)	(22.072.064.084)	Beban bunga dan keuangan lainnya	(69.308.059)	39.205.351		
			<b>RUGI BERSIH KOMPREHENSIF</b>	<b>(22.882.462.480)</b>	<b>(7.184.800.962)</b>		
			<b>RUGI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
			Pemilik entitas induk	(22.864.089.637)	(7.436.765.987)		
			Kepentingan non-pengendali	(5.625.299)	212.759.734		
				<b>(22.869.714.936)</b>	<b>(7.224.006.253)</b>		
			<b>JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
			Pemilik entitas induk	(22.933.397.696)	(7.397.560.636)		
			Kepentingan non-pengendali	(22.939.022.995)	(7.184.800.962)		
				<b>(45.872.420.691)</b>	<b>(14.582.361.598)</b>		
			<b>RUGI PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN</b>	<b>(15.000)</b>	<b>(4.74)</b>		
			<b>RUGI KOMPREHENSIF PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN</b>	<b>(15.000)</b>	<b>(4.88)</b>		

Catatan: Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Karsika, Pusdindaga Subartono yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Haris Siregar, S.E., Ak., CA, CPA, ASEAN CPA, yang memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 02 Mei 2023.

Makassar, 02 Mei 2023  
S.E. & O.  
PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  
Direksi